

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 dalam wadah kesatuan Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.²

Pembangunan Nasional memerlukan sumber pendanaan yang tidak sedikit guna mencapai sasaran-sasarannya seperti : pembangunan dalam bidang ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dll. Sasaran itu terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu, terutama pembangunan dibidang ekonomi, tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk peningkatan taraf hidup dibidang ekonomi, maka diperlukan dana dan modal yang besar agar terpenuhi kebutuhan - kebutuhan dalam masyarakat. Mengingat kebutuhan masyarakat dalam arti kata manusia yang beraneka ragam, yang mana hal ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah

¹ Tap MPR no II /MPR/1998 tentang GBHN

² *Ibid.*

penduduk, kemajuan teknologi, dan tingkat kebudayaan manusia yang semakin meningkat.³

Langkah utama pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan cara memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat atau organ-organ yang membutuhkan tambahan modal dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan penghidupannya. Dalam perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia, perkreditan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar sekarang ini, apalagi ditambah dengan system moneter yang komplek, menjadikan perkreditan makin digandrungi/ dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam mengisi kebutuhan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat, perkreditan ini masih dianggap sektor yang paling vital menurut tinjauan ekonomi.⁴

Pemberian kredit kepada masyarakat pada dasarnya bermaksud untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan usaha produktif maupun konsumtif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kredit yang digunakan untuk menunjang dunia usaha dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari masalah permodalan. Sementara Modal adalah hal terpenting dalam melakukan sebuah usaha, oleh karena itu masyarakat berusaha mendapatkan modal dengan berbagai cara salah satunya

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 74

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 8

melalui lembaga pembiayaan atau keuangan.⁵ Lembaga pembiayaan atau Lembaga keuangan yang berpengaruh besar dalam Pembangunan Nasional Indonesia pada saat ini adalah Bank, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perbankan menurut ketentuan UU diatas jelas berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sangat membutuhkan pendanaan atau permodalan yang besar, dimana modal tersebut hanya mampu diberikan oleh lembaga perbankan, melalui pemberian kredit baik kepada perorangan maupun kepada badan usaha atau perusahaan yang membutuhkan dana/modal.

Adapun pengertian kredit menurut UU No 10 tahun 1998 dalam Pasal 1 butir 11 menyebutkan:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi pinjaman/utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Melalui pemberian kredit inilah pembangunan-pembangunan di Indonesia dibiayai oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan di berbagai bidang. Oleh karena peran perbankan yang dirasa sangat penting dalam memacu roda pembangunan, maka tak jarang adanya persaingan diantara lembaga

⁵ M. Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2008, hlm.70

keuangan terutama perbankan ini, apalagi makin menjamurnya bank-bank swasta yang juga meluncurkan produk-produk baru yang makin menarik simpati nasabahnya. Bank-bank yang ada saling berpacu dan bersaing ketat untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya dengan cara menyalurkan berbagai bentuk pinjaman kredit yang murah dan cepat, sehingga nasabah semakin dipermudah untuk menilai bank mana yang benar-benar memberikan rasa aman dalam menyimpan dana maupun dalam melakukan peminjaman/kredit.⁶

Pada dasarnya bank dalam mengucurkan kredit dalam bentuk pinjaman usaha dapat berupa :

1. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Kredit ini ditunjukan untuk pengembangan usaha debitur sehingga dapat memperluas daerah pemasaran.
2. Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan. Kredit ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang akan membuka usaha namun terkendala dengan masalah permodalan.
3. Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi

⁶ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT Gramedia, 2003,hal.34

dalam skala kebutuhan rumah tangga yang perlunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.

Bentuk pinjaman kredit yang ke tiga diatas pada saat sekarang ini sangat digandrungi masyarakat dalam menambah modal usaha maupun hanya sekedar pembelian barang/konsumtif seperti pembelian rumah, mobil atau yang lainnya. Hal ini sering ditawarkan pihak bank kepada Pegawai-pegawai Pemerintah atau Perusahaan dengan jaminan SK pengangkatan pegawai yang bersangkutan.

Jaminan sebagai salah satu aspek terpenting dalam pemberian kredit oleh bank bertujuan untuk memberi keyakinan pada pihak bank atas kesanggupan pihak debitur dalam melunasi kredit yang telah dikucurkan oleh pihak bank. Dengan kata lain jaminan tersebut berguna untuk melindungi uang yang telah dipinjamkan oleh pihak bank kepada debitur dari segala resiko kerugian yang ditimbulkan sesudah terjadinya peminjaman baik karena disengaja maupun tidak disengaja oleh pihak debitur. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh debitur akan menjadi beban bagi dirinya, sehingga akan timbul niat/itikad yang sungguh-sungguh dalam diri debitur untuk melunasi pinjaman kredit yang telah diperolehnya.⁷

Hal mengenai jaminan ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi BI No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yang menyebutkan bahwa:

“ Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”

⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 113

Jaminan utang atau yang sering disebut dengan jaminan kredit (agunan) adalah salah satu persyaratan dalam pemberian kredit, agunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan dapat juga berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).⁸ Jaminan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atau berupa surat keputusan Pensiun Pegawai Pegeri Sipil, dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 (1) disebutkan bahwa:

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Sedangkan ayat (2) nya berbunyi :

“Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Dan ayat (3) dari UU ini juga menyatakan bahwa :

“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

⁸ Hermansyah, op.cit. hlm. 68

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”

Sementara pada Pasal 6 UU no 5 tahun 2014 disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara ini terbagi 2 yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil dan
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja disingkat dengan PPPK.

Dimana pada Pasal 7 dinyatakan bahwa :

“PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.”

Selanjutnya pada Pasal 21 dan 22 UU No 5 Tahun 2014 dinyatakan: PNS berhak memperoleh:

1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. perlindungan; dan
5. pengembangan kompetensi.

Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan diatas jelas bahwa PNS adalah Aparatur Sipil Negara, yang keberadaannya tidak lagi diatur dalam UU No 8 tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebabkan karena UU No 43 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan tuntutan

Nasional dan Tantangan Global. Walaupun begitu penyebutan PNS masih familiar dipakai masyarakat ketimbang ASN, apalagi dari penjelasan Pasal 6 UU No 5 Tahun 2014 tegas menyatakan bahwa setiap PNS adalah ASN, tetapi tidak semua ASN adalah PNS, hal ini terutama ditujukan pada Instansi Pendidikan. Seorang guru yang bekerja pada Instansi pemerintahan tetap disebut sebagai PNS pada saat seorang guru mengajukan kenaikan pangkat atau pengusulan gaji Berkala, diluar dari itu seorang guru juga dikatakan ASN.

Kredit yang diberikan pada Pegawai ASN memegang peranan penting sebagai penggerak utama roda pembangunan, sejalan dengan peranan pembangunan dibidang lainnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, karena Pegawai ASN juga merupakan manusia yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam dan selalu meningkat setiap saat, sedangkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat terbatas, sehingga atas dasar inilah seorang Pegawai ASN memerlukan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat tersebut.

Dalam pemberian kredit pada Pegawai ASN tersebut pihak Bank diberikan kuasa untuk memotong gaji yang bersangkutan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian. Sehingga pelunasan kredit diambil dari pemotongan gaji Pegawai ASN tersebut setiap bulannya, yang mana pemotongan dilakukan oleh Bendahara gaji dimana PNS yang bersangkutan bekerja.

Di SMA 15 Padang ditempat Penulis bekerja, Bank-Bank Pemerintah seperti Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Nagari) , Bank Mandiri serta Bank Tabungan Pensiunan Nasional berlomba-lomba menawarkan pinjaman kredit dengan jaminan SK para ASN/PNS dengan suku bunga rendah, provisi dan asuransi yang ringan. Dimana kredit ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan para ASN/ PNS yang semakin hari semakin meningkat. Apakah untuk kebutuhan perumahan, uang sekolah atau kuliah anak-anak mereka sampai kepada kebutuhan sekunder lainnya seperti pembelian mobil ataupun wisata religi, yang mana pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung oleh Bendaharawan Gaji di SMA 15 itu sendiri, yang terlihat dari berkurangnya gaji yang diterima oleh PNS bersangkutan pada rekening Banknya.

Disetiap instansi pemerintah maupun instansi lainnya selalu dibutuhkan yang namanya Bendahara dalam stukturisasi kerja. Begitu juga di Instansi Pendidikan khususnya di SMAN 15 Padang, dimana sturuktur kepemimpinan terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha serta Bendaharawan Gaji.

Pinjaman kredit yang disalurkan Bank ke SMA 15 ada dari berbagai Bank Pemerintah seperti Bank Pembangunan Sumbar (Nagari), BRI, Mandiri serta BTPN. Bank Mandiri cabang Padang berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara SMA 15 dengan Bank Mandiri sendiri yang terjadi sekitar tahun 2013, tentang Layanan Fasilitas Kredit Serba Guna Mikro (KSM) Non Payrol, telah merekrut nasabah dari PNS / ASN SMA 15 Padang hampir setengah jumlah PNS/ASN yang ada. Layanan pinjaman yang langsung dikelola oleh Bendahara

gaji atas dasar persetujuan Kepala Sekolah SMA 15, memudahkan pihak Bank Mandiri dalam menarik nasabah/debitur sebanyak-banyaknya, hal ini tentu saja juga akan menguntungkan pihak Bendahara dengan adanya komitmen pemberian sejumlah fee dari jumlah pemotongan peminjaman debitur yang dilakukan Bendahara.

Di SMAN 15 Padang Bendaharawan Gaji dipegang Oleh Arisman Salim, ST yang bertugas sebagai bendahara sejak November 2016 menggantikan Bendaharawan lama. Sebagai bendaharawan Gaji Arisman bertugas untuk melakukan pemotongan gaji untuk semua pinjaman Guru dan Karyawan, baik itu pinjaman dari Bank maupun dari Koperasi Milik SMAN 15 sendiri, maupun pinjaman yang lainnya. Disamping itu bendaharawan juga bertugas untuk mengusulkan Kenaikan Gaji berkala Guru serta mengurus perubahan gaji dikarenakan kenaikan pangkat atau hal-hal lain yang dialami seorang guru dan karyawan.

Untuk melakukan pemotongan gaji terhadap semua pinjaman guru dan karyawan di SMAN 15 Padang yang meminjam uang pada Bank, Disini Bendahara dalam hal ini mewakili pihak sekolah melakukan perjanjian / kerjasama dengan pihak Bank dengan persyaratan-persyaratan yang hanya diketahui oleh Pimpinan Sekolah dan Bendaharawan, seharusnya atau *das sollen* pinjaman yang dilakukan oleh ASN tidak perlu dilakukan pemotongan oleh bendahara, cukup ASN yang bersangkutan mengantarkan angsuran cicilan pinjamannya tersebut langsung ke pihak bank, tapi pada kenyataannya *das sein* pihak bank bekerjasama dengan bendahara dalam melakukan pemotongan gaji

terhadap pinjaman dari ASN sehingga apabila terjadi keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran pinjaman pihak ASN yang dirugikan. Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis dalam mengangkat judul **“Tanggung Jawab Pemotongan Gaji oleh Bendahara Gaji Terhadap Perjanjian Pinjaman Antara PT Bank Mandiri Dengan ASN di SMAN 15 Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian antara Bank dengan Bendaharawan gaji dalam pemotongan gaji ASN di SMAN 15 Padang
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank dengan Bendaharawan gaji dalam pemotongan gaji ASN di SMAN 15 Padang.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian antara Bank dengan Bendahara Gaji dalam Pemotongan Gaji ASN/PNS
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara Bank dengan Bendahara gaji.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun praktis yang diperoleh antara lain:

1. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam lingkup perdata.
2. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian penulisan ilmiah.
3. Memberikan kontribusi positif bagi kalangan akademis sehingga mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan
4. Memberikan alternatif pemecahan baik teori maupun praktek terkait masalah yang timbul dengan pemberian kredit oleh pihak Bank kepada ASN/PNS dengan cara pemotongan gaji oleh Bendaharawan.

E. Keaslian Penulisan

Penelitian mengenai tanggung jawab bendahara dalam pemotongan gaji ASN sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan adalah:

- Tesis dari Chintya Monika Rizkyawati, dengan Nomor Induk Mahasiswa 100130159 Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2018 dengan judul “Keabsahan Hukum Terhadap Hubungan Pegawai yang memberikan kuasa pemotongan gaji kepada Koperasi di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa,” dan permasalahan yang diteliti adalah :

- a. Bagaimanakah keabsahan Hukum Pemberian kuasa pemotongan gaji pada Koperasi oleh ASN di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa.
- b. Siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian pemotongan gaji oleh Koperasi.

Penelitian tesis diatas dilakukan pada SMA Negeri 1 Tanjung Morawa dengan menitik beratkan pada pinjaman yang diberikan koperasi pada pegawai ASN di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. Hal ini menjadi perbedaan mendasar, selain lokasi penelitian, juga subjek penelitian adalah koperasi sementara penulis menitik beratkan pada Bendahara gaji di SMAN 15 Padang.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (*Variabel*) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir (*Frame Of Thinking*) dalam memahami serta menangani segala permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut.⁹ Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulisan mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, dan pegangan teoritis.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁰ Fungsi dari kerangka teori selaras dengan apa yang digunakan, yaitu bahwa teori-teori yang relevan dapat digunakan untuk menjelaskan tentang

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982, hlm. 6

¹⁰ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Banjar Maju, 1994, hlm. 80

variabel yang akan diteliti, setara sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan.¹¹ Dalam penelitian ini mengacu kepada beberapa kerangka teori yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan paradigma teori positivistik sebagai these dari teori hukum alam, sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “*the searc for justice*”.¹² Positivisme yuridis telah dipelopori oleh aliran hukum Humanisme antara lain Jean Bordin dengan idenya tentang kedaulatan raja. Menurut ajaran ini satu-satunya sumber hukum adalah pembentukan Negara.¹³

Teori kepastian hukum juga dipelopori oleh Agustuste Comte yang mengatakan pada dasarnya kaidah hukum itu sendiri tanpa melibatkan kaidah-kaidah diluar non hukum (Etika), hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai azaz moral yang abstrak tentang keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai *lege* atau *lex*.¹⁴ Selanjutnya John Austin selaku aliran positivisme berpendapat: “*Lex is A Command of the law*”, hukum adalah perintah dari penguasa yang kekuasaan tertinggi dan berdaulat, aturan yang berlaku adalah aturan yang tertulis sebagai penjelmaan kehendak penguasa karenanya harus dipenuhi, jika tidak siaplah

¹¹ Soegiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfa Beta, 1983, hlm. 200

¹² Theo Huijiber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yokyakarta: Kanisius, 1995, hlm 196

¹³ Ibid, 129

¹⁴ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Mengingat Kembali*, Bandung: Reifika Aditama, 2009, Hlm. 80

terima sanksi, bukan persoalan adil atau tidak, juga bukan soal relevan atau tidak, serta ia ada dan sah secara yuridis.¹⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum, akan tetapi tidak bisa untuk mengakomodir semua kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pada masyarakat moderen, aturan yang bersifat umum tempat dimana dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan tersebut adalah undang-undang.¹⁶ Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan individu, sehingga dalam pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷ Dapat disimpulkan kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak dilakukan.
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

b. Teori Lahirnya Perjanjian/Perikatan

¹⁵ Bernand L.Tanya dan Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Ruang dan Generasi*, Jogyakarta: Genta Publishing, 2010, Hlm. 119

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm. 157

¹⁷ Ibid, Hlm. 158

Terkait dengan kajian hukum ini, perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan antara para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Pasal 1313 KUHPdata memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata ini hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian itu dibuat. Karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁸ Menurut pendapat seorang pakar hukum R. Subekti, yang dimaksud perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁹

Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata adalah asas

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1990, Hlm. 78

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1996, Hlm. 45

kebebasan berkontrak, yang maksudnya para pihak bebas untuk membuat perjanjian dan bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian, namun kebebasan itu tidak mutlak karena terdapat pembatasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum dalam Bahasa Inggris disebut dengan *The Teori Of Legal Liability* dalam Bahasa Belanda disebut dengan *De Teori Van Wattelijckheid*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut *Die Teori Der Haftung*. Teori Tanggung jawab Hukum merupakan teori yang menganalisis tentang kesediaan dari subjek Hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun kealpaannya.²⁰

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²¹

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*, Rajawali Pres, Jakarta, hal.208

²¹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hal.81

Selain teori yang disampaikan oleh Hans Kelsen ada Teori tradisional yang membedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggung jawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.

Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. Tanggung jawab atasan
2. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
3. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut:

1. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau di bawah perwaliannya.

2. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
3. Guru bertanggung jawab atas muridnya.
4. Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang berada dibawahnya.
5. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya.
6. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung kerana kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
(*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya.

Corporate liability memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.

2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam

lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Untuk tidak menimbulkan salah persepsi terhadap pemahaman penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa definisi yang meliputi:

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).²²

2. Perjanjian /Kesepakatan

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara itu Yahya Harahap mengemukakan pengertian perjanjian sebagai: “ suatu hubungan hukum harta kekayaan/benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi.”

3. Bank

Menurut UU No 10 Tahun 1998 Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

4. Bendaharawan Gaji

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

Bendahara gaji adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menerima, menyimpan, membayar gaji atau mengeluarkan uang/surat berharga/barang-barang milik Instansi pemerintah.

5. Pemotongan Gaji

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pemotongan gaji merupakan proses, cara, perbuatan (memotong, mengerat, memenggal atau mengurangi) upah kerja / balas jasa seseorang / pekerja (pegawai) dalam bentuk uang yang diterima setiap bulan.

6. ASN / PNS

Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundangan-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.²³

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan(Library Research)

Sumber dari penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang terkait. Penelitian ini penulis lakukan di Perpustakaan pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini diperoleh data dengan melihat fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang dilakukan oleh penulis di lokasi yaitu PT Bank Mandiri dan ASN di SMAN 15 Padang.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui studi dokumen dan wawancara mengenai Tanggung Jawab Pemotongan Gaji oleh Bendahara Gaji Terhadap Perjanjian Pinjaman Antara PT Bank Mandiri Dengan ASN di SMAN 15 Padang.

²³ Soejono Soekanto, Op.Cit, Hlm.50

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa buku-buku hukum seperti :

a) Bahan Hukum primer

yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah :

- 
- i. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - ii. UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU no 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - iii. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - iv. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - v. Peraturan BI no 23 tahun 1999 tentang pemberian Kredit

b) Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum, buku yang ditulis oleh para penulis atau sarjana yang berkaitan dengan judul penulis.

c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang,

yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa, media masa dan kamus hukum yang berkaitan dengan judul penulis.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁴ Teknik pengumpulan mempelajari dokumen-dokumen untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penulis.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik wawancara yaitu dengan langsung mengajukan pertanyaan kepada responden yang didalamnya terdapat beberapa pertanyaan dan dijawab oleh informan atau responden secara tertulis. Dalam penelitian ini yang menjadi responden penulis adalah : Bendaharawan Gaji pada SMAN 15 Padang beserta pihak-pihak terkait yang turut memberikan informasi terhadap penelitian peneliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yang akan merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, Hlm

kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis data

Setelah data yang diperoleh diseleksi, kemudian dilakukan analisis secara metode kualitatif yaitu analisis yang bukan berbentuk angka-angka tetapi di deskriptifkan kualitatif (secara kalimat-kalimat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian antara Bank dengan Bendaharawan gaji dihubungkan dengan kenyataan di lapangan, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya.

H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini disusun atas beberapa bagian yang semuanya tersusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan menguraikan tinjauan umum mengenai perjanjian, tentang Bank, tentang perjanjian antara bank dengan Bendaharawan gaji serta hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memuat tentang uraian lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah. Diantaranya

tentang pelaksanaan perjanjian serta hambatan yang dialami terkait dengan pelaksanaan perjanjian

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

